LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN JUNI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Rabu, 10 Juli 2024

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 51,12 %

b. Keuangan = 10.447.250.608 (46,69%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.600.000			0		
1	FGD PPPA	26.600.000	100	0	0	(100)	kegiatan FGD PPPA bersama DPRD belum dapat dilaksanakan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.825.000			54.116.595		
1	Pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan dan kinerja OPD	93.825.000	66,22	63,01	54.116.595	(3,21)	beberapa perjalanan dinas akan di spj kan di bulan Juli, sisanya menyesuaikan undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.800.000			16.761.100		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.800.000	38,54	18,46	16.761.100	(20,08)	Menyesuaikan kebutuhan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	72.990.000			15.712.000		
1	Roadshow PUG bagi OPD Provinsi	28.670.000	100	70,68	11.770.000	(29,32)	Bulan ini terselenggara : Roadshow SEKDA (Biro-biro digabung menjadi 1 Roadshow) serta Bimtek Kepemimpinan Perempuan desa (antar OPD) - pembiayaan dari Kemenpppa. OPD lain belum menyanggupi penyelenggaraan Roadshow bulan Juni karena penyelenggaraan Kegiatan masing-masing OPD yang padat (sulit mengumpulkan focal point)
2	Konsultasi PUG	44.320.000	50,12	45,48	3.942.000	(4,64)	Efisiensi Perjalanan Dinas
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	249.731.000			64.662.000		
1	Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	249.731.000	29,39	26,11	64.662.000	(3,28)	perjadin belum ada yg realisasi menyesuaikan jadwal BKOW

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	85.344.000			35.543.600		
1	Pelaksanaan Layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga)	85.344.000	49,98	41,64	35.543.600	(8,34)	ada satu tenaga non asn yg resign
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	51.000.000			12.600.000		
1	Pelaksanaan FGD Pembahasan Kebijakan Perlindungan Anak	51.000.000	30,60	28,64	12.600.000	(1,96)	pelaksanaan FGD Pembahasan Kebijakan membutuhkan satu narasumber per klaster KLA. Menyisakan UH Tim Penyusun dan honor narasumber
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera							
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	58.844.000			36.254.660		
1	Sosialisasi Penurunan Angka Stunting Melalui Kelompok BKB	58.844.000	63,74	61,60	36.254.660	(2,14)	sisa perjadin belum dapat digunakan
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	9	0	0			
	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

-

Upaya

-

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Bimtek UPPKA di Desa Sukomakmur (KS)
2. Kegiatan Rakor BPD AKU (KS)
3. Workshop Fasilitasi Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (Dalduk)
4. FGD Strategi Meningkatkan Kualitas Kampung KB Mandiri dan Berkelanjutan (Dalduk)
5. Ngopi Penak (Puspaga)
6. FGD Pembahasan Kebijakan Perlindungan Anak pertemuan ke empat (PA)

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Juni 2024, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Rabu, 10 Juli 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM

NIP. 196811241993102001